



PENGUMUMAN

NOMOR : 01/PANSEL.JPTU/11/2021

TENTANG SELEKSI CALON KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN 2021

Dalam rangka Pengisian Jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini kami mengundang Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di seluruh wilayah Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut :

I. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 128/TPA Tahun 2021 Tentang Pembentukan Panitia Seleksi Calon Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);

II. JABATAN

Nama Jabatan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan fungsi dari jabatan tersebut sebagai berikut :

NAMA JABATAN	TUGAS DAN FUNGSI
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	<p>Tugas: Melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.</p> <p>Fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerja sama Pemerintah dengan badan usaha;2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik;5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi, dan pendapat hukum;6. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan7. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP

III. PERSYARATAN UMUM

1. PNS

- a. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV, diutamakan pascasarjana;
- b. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- c. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun;
- d. Sedang atau pernah menduduki JPT Madya atau Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama paling singkat 2 (dua) tahun;
- e. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- f. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 30 Desember 2021;
- g. Sekurang-kurangnya memiliki pangkat Pembina Utama Madya (IV/d); dan
- h. Sehat jasmani dan rohani.

2. NON PNS

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
- c. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
- d. Memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 15 (lima belas) tahun di bidang teknis dan manajerial;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik pada saat pendaftaran seleksi terbuka;
- f. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- g. Memiliki rekam jejak Jabatan, integritas, dan moralitas yang baik;
- h. Usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun pada tanggal 30 Desember 2021;
- i. Sehat jasmani dan rohani;
- j. Tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta;

IV. PERSYARATAN ADMINISTRASI

1. PNS

- a. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti proses seleksi;
- b. Tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 5 (lima) tahun terakhir;
- c. Menandatangani Pakta Integritas;
- d. Tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi pengurus/anggota partai politik atau tidak pernah menjadi calon anggota legislatif dari partai politik;
- e. Telah mengikuti dan lulus **Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat II**, diutamakan telah lulus **Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat I**, kecuali bagi pelamar yang berasal dari pemangku Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama;
- f. Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- g. Telah menyerahkan **LHKPN tahun 2020 bagi pelamar dari JPT Madya** dan **LHKASN** Tahun 2020 bagi pelamar dari Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Utama;
- h. Telah menyerahkan **SPT tahunan** Tahun 2020; dan
- i. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh Pelamar dan bermaterai Rp10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. Non PNS

- a. Menandatangani Pakta Integritas;
- b. Telah menyerahkan **SPT tahunan** Tahun 2020; dan
- c. Mengajukan surat lamaran yang ditandatangani oleh Pelamar dan bermaterai Rp10.000,- yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

V. PERSYARATAN KHUSUS :

- a. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam tentang Kebijakan dan Sistem Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Memiliki pengalaman dan kompetensi dalam menyusun dan mengimplementasi regulasi di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Diutamakan memiliki Sertifikat Keahlian di bidang Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Diutamakan memiliki prestasi Nasional dan/atau Internasional.

VI. TATA CARA PENGAJUAN LAMARAN :

1. Pendaftaran dilakukan secara *online* melalui *website* <https://rekutmen.lkpp.go.id>.
2. Seluruh dokumen berkas lamaran diunggah (*upload*) dalam bentuk *softcopy* (scan) dengan format PDF (kecuali untuk foto dalam format jpg/jpeg).
3. Dokumen berkas lamaran yang diunggah ialah sebagai berikut:
 - a. Surat Lamaran yang ditandatangani oleh Pelamar dan bermaterai Rp 10.000,- (**sebagaimana lampiran I**);
 - b. Pakta integritas (**sebagaimana lampiran II**) ;
 - c. Daftar Riwayat Hidup bermaterai Rp 10.000,- yang dilengkapi dengan pas foto berwarna (**sebagaimana lampiran III**);
 - d. KTP;
 - e. Pas foto berwarna;
 - f. Ijazah terakhir;
 - g. Tanda bukti penyampaian SPT Tahun 2020;
 - h. Surat Pernyataan tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota partai politik (**sebagaimana lampiran IV**);
 - i. Surat Pernyataan tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta (**sebagaimana lampiran IV**);
 - j. Sertifikat Keahlian di Bidang Pengadaan Barang/Jasa apabila ada.

Dokumen tambahan yang harus diunggah oleh Pelamar yang berasal dari PNS sebagai berikut :

- a. Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan terakhir;
- b. Keputusan Pengangkatan dalam Pangkat terakhir;
- c. Penilaian Prestasi Kerja 2 (dua) tahun terakhir (tahun 2019 dan 2020) minimal Baik;
- d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan yang dipersyaratkan;
- e. Tanda bukti pelaporan LHKPN/LHKASN Tahun 2020;

- f. Surat Persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (**sebagaimana lampiran V**);
- g. Surat Keterangan tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dikenai sanksi pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir (**sebagaimana lampiran VI**).
4. Seluruh pengumuman dan perkembangan tahapan seleksi akan disampaikan melalui website <https://lkpp.go.id>.
5. Apabila terdapat kesulitan dalam proses pendaftaran secara *online*, harap menghubungi Biro Hukum, Organisasi, dan SDM LKPP melalui nomor telepon seluler 081288601916 (WA) dan email rekrutmen@lkpp.go.id;
6. Tata cara pendaftaran *online* dapat dilihat **sebagaimana lampiran VII**.

VII. TAHAPAN DAN JADWAL PELAKSANAAN SELEKSI :

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Pengumuman	09 – 15 November 2021	5 hari kerja
2	Pendaftaran <i>online</i> dengan <i>upload</i> berkas	09 – 15 November 2021	7 hari kalender
3	Seleksi Administrasi	16 November 2021	1 hari kalender
4	Pengumuman Seleksi Administrasi	17 November 2021	1 hari kalender
5	Rekam Jejak	09 – 28 November 2021	
6	Seleksi Penulisan Makalah	18 November 2021	1 hari kalender
7	Pengumuman Hasil Penulisan Makalah	20 November 2021	1 hari kalender
8	Seleksi <i>Assessment Center</i>	21 – 22 November 2021	2 hari kalender
9	Tes Kesehatan	23 – 24 November 2021	2 hari kalender
10	Pengumuman Hasil <i>Assessment Center</i>	25 November 2021	1 hari kalender
11	Seleksi Presentasi dan Wawancara dengan Panitia Seleksi	26 November 2021	1 hari kalender
12	Pengumuman 3 (Tiga) Besar	30 November 2021	1 hari kalender

Catatan : a. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, dan setiap perubahan jadwal akan diberitahukan kepada peserta melalui website.

b. Seluruh Seleksi diupayakan terlaksana secara online.


VIII. KETENTUAN LAIN – LAIN :

1. Dalam proses Seleksi Calon Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelamar tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.

2. Berkas lamaran yang akan diproses ialah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
3. Pelaksanaan tahapan seleksi akan dilakukan secara virtual dan/atau secara tatap muka.
4. Panitia Seleksi akan melakukan penelusuran rekam jejak calon secara tertutup dan obyektif.
5. Pelamar yang tidak hadir dan/atau tidak mengikuti tahapan seleksi dengan alasan apapun pada waktu dan tempat yang ditetapkan, maka dinyatakan gugur.
6. Pelamar yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan pelamar yang memiliki peringkat terbaik dibawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat.
7. Apabila dalam proses seleksi diketahui bahwa pelamar memberikan sesuatu dalam bentuk apapun yang sifatnya dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dalam Seleksi Calon Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan keikutsertaan pelamar tersebut.
8. Apabila pelamar diketahui memberikan data/keterangan tidak benar, maka Panitia Seleksi berhak membatalkan hasil seleksi tersebut.
9. Panitia Seleksi tidak melakukan komunikasi melalui telepon dan kepada pelamar agar berhati-hati terhadap segala upaya penyalahgunaan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dalam proses seleksi terbuka ini.
10. Keputusan Panitia Seleksi bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Akibat kelalaian tidak mengikuti perkembangan informasi menjadi tanggung jawab pelamar.
12. Biaya transportasi, akomodasi, dan biaya lainnya selama mengikuti seleksi ditanggung oleh masing - masing Pelamar.
13. **Panitia Seleksi mengundang masyarakat untuk memberikan masukan atau informasi mengenai Pelamar yang dinyatakan lulus administrasi. Masukan tersebut dapat disampaikan melalui email rekrutmen@lkpp.go.id.**

Jakarta, 9 November 2021
Sekretaris Kementerian
PPN/Sekretaris Utama Bappenas
Selaku Ketua Panitia Seleksi,




Himawan Hariyoga



Lampiran I Pengumuman

Nomor : 01/PANSEL.JPTU /11/2021

Tanggal : 9 November 2021

SURAT LAMARAN

Jakarta, November 2021

Yth. Ketua Panitia Seleksi Calon Kepala Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Di Jakarta

Sehubungan dengan Pengumuman Seleksi Calon Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 01/PANSEL.JPTU/11/2021 tanggal 9 November 2021, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIP/NIK. :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit/Instansi :

mengajukan diri mengikuti Seleksi pada Jabatan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan akan mengikuti seluruh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi.

Sebagai kelengkapan pendaftaran, terlampir saya sampaikan seluruh dokumen persyaratan yang ditentukan.

Demikian saya sampaikan, atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.

Hormat saya,

Meterai Rp 10.000

Nama
NIP/NIK

Lampiran II Pengumuman
Nomor :01/PANSEL.JPTU /11/2021
Tanggal : 9 November 2021

PAKTA INTEGRITAS

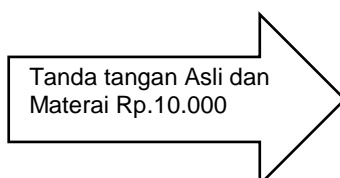
Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIP/NIK :
Pangkat/Gol. Ruang :
Tempat, tanggal lahir :
Jabatan :
Alamat :

Dalam rangka mengikuti Seleksi Calon Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. Tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan Seleksi Calon Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang dapat diaktegorikan sebagai suap dan/atau gratifikasi;
5. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

.....2021



Nama
NIP/NIK

Lampiran III Pengumuman
Nomor :01/PANSEL.JPTU /11/2021
Tanggal : 9 November 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Pas Foto
Berwarna

DATA PRIBADI

1.	Nama Lengkap dan Gelar	
2.	NIP/NIK	
3.	Pangkat/Gol	
4.	Tempat, Tanggal Lahir	
5.	Jenis Kelamin	
6.	Agama	
7.	Status Perkawinan	
8.	Alamat	
	a. Jalan	
	b. Kelurahan / Desa	
	c. Kecamatan	
	d. Kabupaten / Kota	
	e. Provinsi	
9.	Telepon Rumah	
10.	Nomor HP	
11.	<i>Email</i>	
12.	Alamat sosial media (<i>Facebook, Instagram. Twitter, dll</i>)	

RIWAYAT JABATAN

[illegible]

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

Jenjang	Nama Sekolah/Perguruan Tinggi	Program Studi	Tahun Lulus
S.3			
S.2			
S.1			
SMA			
SMP			
SD			

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

[illegible]

KURSUS/SEMINAR/SIMPOSIUM

No	Nama Kegiatan	Tahun	Penyelenggara

PENUGASAN LUAR NEGERI

No	Negara	Tujuan Penugasan	Lama Penugasan

PENGHARGAAN

No	Jenis Penghargaan	Tahun	Lembaga/Instansi yang memberikan

PRESTASI

No	Jenis Prestasi	Deskripsi	Tahun

HASIL KARYA TULIS

No	Judul	Media Publikasi	Tahun

SERTIFIKASI YANG RELEVAN

No	Nama Sertifikasi	Tahun	Lembaga/Instansi yang memberikan	Nomor Sertifikat

PENGALAMAN PENGADAAN BARANG/JASA (PBJ)

No	Tugas dalam PBJ	Tahun	Nomor SK

RIWAYAT KELUARGA

1. Istri/Suami

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Pekerjaan	Keterangan

2. Anak

No	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Tanggal Menikah	Pekerjaan	Keterangan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat keterangan yang tidak benar, saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah.

.....2021

Tanda tangan Asli dan
Materai Rp.10.000

(Nama dan NIP/NIK)

Keterangan:

- Peserta dapat menambahkan baris pada semua tabel apabila data yang perlu ditampilkan belum terakomodasi pada baris tabel yang tersedia.

Lampiran IV Pengumuman
Nomor : 01/PANSEL.JPTU/11/2021
Tanggal : 9 November 2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Tempat, Tanggal Lahir :
NIP/NIK :
Pangkat (Gol) :
Jabatan :
Unit/Instansi :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

1. tidak memiliki afiliasi dan/atau menjadi anggota Partai Politik pada saat pendaftaran seleksi terbuka;
2. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Republik Indonesia atau pegawai swasta.

Surat Pernyataan ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam rangka mendaftarkan diri mengikuti Seleksi Calon Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dibuat dalam keadaan sadar dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menanggung segala risiko sesuai ketentuan yang berlaku.

.....2021



Nama
NIP/NIK

Lampiran V Pengumuman
Nomor : 01/PANSEL.JPTU/11/2021
Tanggal : 9 November 2021

LOGO

INSTANSI

(NAMA INSTANSI)
SURAT PERSETUJUAN PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

Kami selaku Pejabat Pembina Kepegawaian menyatakan bahwa:

Nama Lengkap (dengan gelar) :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :
Instansi :
Jabatan yang dilamar : Kepala LKPP

memenuhi syarat untuk mengikuti Seleksi Calon Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan menyetujui yang bersangkutan untuk mengikuti kegiatan seleksi terbuka dimaksud.

.....2021

Pejabat Pembina Kepegawaian,
(Nama Jabatan)

Tanda tangan Asli
dan Stempel Dinas

(Nama Pejabat dan NIP)

KHUSUS PNS

Lampiran VI Pengumuman

Nomor : 01/PANSEL.JPTU/11/2021

Tanggal : 9 November 2021

LOGO

INSTANSI

**SURAT KETERANGAN
TIDAK SEDANG DALAM PROSES PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN
DAN/ATAU TIDAK PERNAH MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN**

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Instansi :

tidak sedang dalam proses pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tidak pernah menjalani hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak dikenai sanksi pidana dalam 5 (lima) tahun terakhir.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan, dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat Keterangan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia dituntut sesuai ketentuan yang berlaku.

.....2021

Pejabat Pembina
Kepegawaian / Pejabat yang
Berwenang,
(Nama Jabatan)

Tanda tangan Asli dan
Materai Rp.10.000

(Nama Pejabat dan NIP)

Lampiran VII Pengumuman

Nomor : 01/PANSEL.JPTU/11/2021

Tanggal : 9 November 2021

TATA CARA PENDAFTARAN ONLINE

1. Membuat akun pada laman <https://rekrutmen.lkpp.go.id/main/register> (bila belum memiliki akun);
2. Memvalidasi akun melalui link pendaftaran yang telah dikirimkan melalui *email* yang didaftarkan;
3. Melakukan Login (bila sudah memiliki akun atau sudah memvalidasi akun), kemudian melengkapi data diri yang wajib diisi pada menu profil sebagai berikut:
 - a. PNS
 - a. Foto;
 - b. Riwayat Pangkat;
 - c. Riwayat Jabatan;
 - d. Riwayat Pendidikan;
 - b. NON-PNS
 - a. Foto;
 - b. Riwayat Pekerjaan;
 - c. Riwayat Pendidikan.
4. Pada menu **seleksi**, pada kolom jabatan klik “**Lihat**” untuk informasi lebih lanjut dan melakukan pendaftaran dengan mengklik tombol “**Daftar**” sesuai dengan ketentuan dan persyaratan.
 - a. Dokumen dalam bentuk gambar hasil scan dari dokumen asli;
 - b. Ekstensi dokumen adalah :
 - 1) *.jpg atau *.jpeg (maks. File 200 Kb);
 - 2) *.pdf (maks. File 100 Mb)
 - c. Setiap dokumen harus terlihat dan/atau terbaca jelas.